



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Daerah perkotaan merupakan wadah konsentrasi permukiman penduduk dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial dan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan penduduk kota di negara sedang berkembang tidak saja mencerminkan pertumbuhan alami penduduk kota tetapi juga pertumbuhan arus penduduk dari desa ke kota yang cukup besar. Perpindahan arus penduduk dari desa ke perkotaan yang sedang berjalan di negara sedang berkembang sekarang ini sudah terjadi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk kota disebabkan oleh arus gerakan dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan yang lazim kita kenal dengan istilah urbanisasi.

Pada umumnya konsep urbanisasi di artikan sebagai proses yang membawa bagian yang semakin besar penduduk suatu negara berdiam di pusat perkotaan. Mimpinya untuk mengubah nasib dan mendapatkan kehidupan yang layak membuat arus urbanisasi di kota kian meningkat. Setiap tahun urbanisasi dan berbagai bentuk perpindahan bentuk lainnya yang masuk ke kota semakin sulit terbendung. Bagi yang datang dan bekerja, ini akhirnya menjadi beban berat bagi pemerintah kota. Tak hanya masalah sosial seperti gelandangan dan sejenisnya,



urbanisasi juga berdampak pada masalah kependudukan lainnya. Dalam konteks kota Surabaya yang memiliki jumlah penduduk yang mencapai sekitar 3,110,187 orang di tahun 2012, Kota Surabaya berkembang sebagai Kota Metropolitan. Posisi strategis Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat membuatnya selalu dinamis. Menjadi pusat aktivitas sama artinya menjadi jujugan bagi orang dari berbagai daerah. Jumlah penduduk jelas akan semakin meningkat seiring pesona Kota Surabaya yang menjanjikan segala macam kemudahan. Oleh karena itu tantangan besar berikutnya ialah menyiapkan kehidupan yang layak. Kota Surabaya haruslah tetap menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi penghuninya. <sup>1</sup>

Dengan daya tarik kota Surabaya tidak heran bahwa Surabaya adalah salah satu destinasi pencari kerja atau yang bisa disebut dengan kaum urban. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat urbanisasi kota Surabaya dari tahun ke tahun terhitung mulai Juni 2013, angka pendatang dari luar Kota Surabaya tercatat sudah mencapai 28 ribu jiwa lebih. Jumlah tersebut belum termasuk penduduk musiman yang tercatat 3 ribu lebih, sehingga total jumlah penduduk tiap tahun terus meningkat tajam dengan angka pertumbuhan 50 ribu lebih. Terhitung mulai tahun 2011, lanjut dia, jumlah penduduk mencapai 3,024 juta, kemudian

---

<sup>1</sup> Daya tarik kota Surabaya. Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. 8 September 2014. 17.00. <http://www.surabaya.go.id/profilkota/index.php?id=22>



bertambah di 2012 mencapai 3,125 juta dan data terakhir pada Juni 2013 mencapai 3,166 juta.<sup>2</sup>

Di satu sisi kegiatan ekonomi dan sosial penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan yang tinggi semakin memerlukan ruang untuk meningkatkan kegiatan penduduk sehingga menyebabkan semakin bertambahnya ruang untuk mendukung kegiatan sektor informal. Menurut Jayadinata, karakteristik sektor informal yaitu bentuknya tidak terorganisir, kebanyakan usaha sendiri, cara kerja tidak teratur, biaya dari diri sendiri atau sumber tak resmi, dapatlah diketahui betapa banyaknya jumlah anggota masyarakat memilih tipe usaha ini, karena mudah dijadikan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat strata ekonomi rendah yang banyak terdapat di negara kita terutama pada kota besar maupun kecil.<sup>3</sup>

Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 banyak sekali kegiatan ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal. Kegiatan ekonomi sektor informal salah satunya pedagang kaki lima. Bisa dilihat hampir semua kota-kota besar di Indonesia berkembang sangat pesat. Terlebih selama krisis moneter menyebabkan banyak industri gulung tikar, sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini pada gilirannya menambah pengangguran baru, yang nantinya muncul fenomena-fenomena baru pedagang kaki lima sebagai jalan keluarnya dari pengangguran.

---

<sup>2</sup> Hakim, Abdul. 25 Agst 2013. Mencari "Gula" di Surabaya.  
(<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/116446/mencari-gula-di-surabaya>). Diakses pada tanggal 8 September 2014 pukul 17.00

<sup>3</sup> Jayadinata, J.T. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, Bandung: ITB. Hal. 146.



Kemampuan sektor informal dalam menampung tenaga kerja didukung oleh faktor-faktor yang ada. Faktor utama adalah sifat dari sektor ini yang tidak memerlukan persyaratan dan tingkat keterampilan, sektor modal kerja, pendidikan ataupun sarana yang dipergunakan semuanya serba sederhana dan mudah dijangkau oleh semua anggota masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan dapat terlibat didalamnya. Salah satu sektor yang kini menjadi perhatian pemerintah Surabaya adalah sektor tenaga kerja yang sifatnya informal. Sektor kerja informal ini beroperasi pada tempat-tempat tertentu di setiap pusat keramaian kota

Pada dasarnya masalah utama yang dihadapi kebanyakan negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan faktor manusia yang melimpah kebanyakan tidak terlatih, (unskilled) bagi pembangunannya, sehingga penduduk besar adalah sebagai modal pembangunan. Dengan demikian peranan sektor informal menjadi penting, terutama karena kemampuannya dalam menyerap banyak tenaga kerja dan tidak menuntut tingkat ketrampilan yang tinggi, bahkan sektor informal menjadi wadah pengembangan sumberdaya manusia.

Menurut Widodo (2005) dalam diskusi yang digelar Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) dengan topik Sektor Informal Yogyakarta, sektor informal adalah struktur yang tidak terorganisasi, tidak teratur. Sektor Informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi sederhana dan padat tenaga



kerja, tingkat pendidikan dan ketrampilan bisa dibilang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibanding sektor formal.<sup>4</sup>

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa sektor informal pedagang kaki lima mempunyai peranan yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim. Pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai profit misalkan pusat kota, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berfikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan hal-hal yang lain.

Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain hal keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan Kota. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini.

Usaha PKL dalam memajukan usahanya terlihat jelas dengan kegigihan mereka dalam mengembangkan usahanya. Jenis usaha PKL yang tergolong dalam jenis usaha kecil sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil seharusnya bisa lebih berkembang dengan tidak mengganggu kelangsungan kegiatan publik. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan merasa terganggu oleh keberadaan PKL. Hal ini disebabkan semakin melebarnya

---

<sup>4</sup> Kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral, Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan, Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009, hal 1-2





daerah dagang PKL. Dalam hal ini pemerintah mengimbau bahwa trotoar akan ditempati untuk tanan dan resapan air yang memperindah kota.

Campur tangan pemerintah dalam hal ini mempengaruhi pola kehidupan pedagang kaki lima. Hal tersebut terlukis jelas pada konsideran pertama Perda Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang hingga saat ini masih berlaku. Konsideran itu sesungguhnya menjadi paradigma kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan Pemkot hingga hari ini, karena dianggap sebagai sumber masalah, keberadaan PKL harus ditata, maka, eksistensi PKL adalah domain ketertiban, karena menjadi domain ketertiban, selamanya PKL akan berhadap-hadapan dengan satpol PP.

Sementara PKL dapat didukung dalam laporan ILO tentang sektor informal dan formal dibedakan sebagai berikut. Kegiatankegiatan informal adalah sebuah acara untuk melakukan sesuatu yang dicirikan: (1) mudah masuk, (2) bersandar pada sumber daya lokal, (3) usaha milik keluarga, (4) operasi skala kecil, (5) padat karya dan *adapted technology*, (6) ketrampilan diperoleh diluar sistem formal sekolah, (7) tidak diatur dan pasar kompetitif. Sebagai tambahan informal sektor juga kerap diabaikan, jarang didukung, kadang diatur dan kadang secara aktif dihambat oleh pemerintah<sup>5</sup>

Lebih jauh, Perda no. 17 Tahun 2003 mendefinisikan PKL sebagai aktivitas berdagang yang dilakukan di fasilitas umum. Artinya, tanpa disadari, PKL sesungguhnya sudah didesain telah melanggar hukum, bahkan sejak ia

---

<sup>5</sup> Firdausy, Carunia Mulya. (1995). "Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima." Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan. Jakarta: Dewan Riset Nasional dan Bappenas bekerjasama dengan Puslitbang Ekonomi danPembangunan LIPI.hal. 2



didefinisikan. Untuk itu, Pemkot memiliki kekuasaan yang sangat besar atas PKL untuk mengizinkan, memindah, melarang, hingga menggusur.

Pedagang tradisional di pasar tradisional umumnya ditandai dengan hubungan sosial yang dekat, personal dan saling mengenal. Ketika pasar modern dibangun, hubungan sosial itu mulai tergerus. Antara pedagang yang satu dan yang lainnya sudah tidak saling mengenal. Pedagang tradisional sudah sulit menyebut nama di stand sebelahnya. Terjadi perubahan solidaritas sosial dari solidaritas mekanis ke solidaritas organis. Fenomena yang timbul adalah antara pedagang tidak terjalin kepedulian. Di pasar tradisional jarang terjadi pencurian karena mereka saling kenal dan saling membantu mengawasi barang, di pasar modern ini pedagang kerap kali kehilangan barang dagangan.<sup>6</sup>

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah "*Sentralisasi Sektor Informal Perkotaan (Studi Deskriptif Perubahan Sosial - Ekonomi PKL di DTC Wonokromo)*" khususnya pada lantai 1 dimana kawasan tersebut terdapat banyak para pedagang kaki lima terutama dalam hal sentralisasi dan pemusatan jumlah PKL yang berdagang disitu.

## 1.2 Rumusan masalah

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah

---

<sup>6</sup> Martinus Legowo, FX Sri Sadewo & M. Jacky, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Surabaya. Pedagang dan Revitalisasi Pasar Tradisional di Surabaya: Studi Kasus pada Pasar Wonokromo dan Pasar Tambah Rejo Surabaya. Hal 8



dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Pedagang kaki lima seringkali didefinisikan sebagai suatu usaha yang memerlukan modal relatif sedikit, berusaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Usahanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal. Sektor usaha pedagang kaki lima tersebut seringkali menjadi incaran bagi masyarakat dan pendatang baru untuk membuka usaha di daerah perkotaan.

Hal ini disebabkan karena adanya ciri khas dan relatif mudahnya membuka usaha (tidak memerlukan modal yang besar) di sektor tersebut. Pedagang Kaki Lima pada umumnya adalah self-employed, artinya mayoritas Pedagang Kaki Lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang di miliki relatif tidak terlalu besar dan terbagi atas modal tetap berupa peralatan, dan modal kerja. Kontribusi pedagang kaki lima pada perekonomian kota cukup berarti, namun seiring dengan hal itu sektor informal atau dalam penelitian ini difokuskan pada aktifitas pedagang kaki lima (PKL) juga menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan antara lain: masalah kebersihan, pencemaran lingkungan, gangguan keamanan, ketertiban dan kemacetan lalu lintas serta masalah estetika lingkungan kota. Sehingga terjadi pembatasan pedagang kaki lima, hal itu di buktikan dengan Perda Kota Surabaya no.17 tahun 2003. Bukti riil tentang di batasinya ruang gerak PKL maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:





- a. Bagaimana kondisi PKL yang sudah mengalami pelaksanaan program sentralisasi PKL di DTC Wonokromo ?
- b. Bagaimana kondisi perubahan sosial – ekonomi yang terjadi pada PKL yang mengalami program sentralisasi PKL di DTC Wonokromo ?
- c. Bagaimana strategi PKL dalam mengatasi perubahan social – ekonomi setelah adanya pelaksanaan program sentralisasi PKL di DTC Wonokromo ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan penelitian**

- a) Untuk mengetahui kondisi PKL yang sudah mengalami pelaksanaan program sentralisasi di DTC Wonokromo.
- b) Untuk mengetahui kondisi perubahan sosial – ekonomi yang terjadi pada PKL yang mengalami program sentralisasi PKL di DTC Wonokromo.
- c) Untuk mengetahui strategi PKL dalam mengatasi perubahan sosial – ekonomi setelah adanya pelaksanaan program sentralisasi PKL di DTC Wonokromo.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

##### **1.3.2.1 Praktis**

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah kota Surabaya dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan upaya menahan laju pertumbuhan penduduk yang berasal dari daerah lain di sekitar kota Surabaya.



- b) Diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi kehidupan sosial ekonomi pedagang kaki lima, sehingga pemimpin lembaga atau institusi dapat mengambil langkah-langkah dalam hal penanganan masalah yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima.

#### **1.3.2.2 Teoritis**

- a) Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b) Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pengembangan dan pengkajian permasalahan perkotaan yang berhubungan dengan pedagang kaki lima

### **1.4 KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **1.4.1 Konsep Sentralisasi**

Sentralisasi adalah penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat yang dianggap sebagai pusat; penyentralan; pemusatan. Atau lebih berarti sebagai memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) Sentralisasi adalah penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat yg dianggap sebagai pusat; penyentralan; pemusatan. Atau lebih berarti sebagai memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah.



Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat.

Sentralisasi daerah perkotaan sebagai ruang yang digunakan untuk pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan pendidikan dan sosial diimbangi dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi. Daerah perkotaan berkembang secara dinamis mengikuti proses zaman.

Modernisasi dan era globalisasi telah membawa dampak terhadap pesatnya perkembangan daerah perkotaan. Daya tarik daerah perkotaan dengan segala heterogenitas aktivitas di dalamnya mendorong pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan taraf kesejahteraan sosial dan ekonomi. Hal ini berimplikasi kepada peningkatan permintaan terhadap akses sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan. Kadangkala antara kebutuhan infrastruktur sarana dan prasarana yang ada tidak sebanding dan seringkali tidak bisa mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk. Antara jumlah sarana dan prasarana yang diminta dengan jumlah yang tersedia tidak seimbang, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Salah satu sarana dan prasarana yang penting dibutuhkan untuk menunjang aktivitas manusia adalah transportasi dan jalan.



Berbagai masalah seringkali muncul di jalan sebagai akibat tekanan yang muncul karena ketidakmampuan daerah perkotaan yang berpacu dengan peningkatan jumlah penduduk. Masalah kemacetan, kesemerawutan, pencemaran lingkungan, dan kecelakaan lalu lintas adalah masalah yang seringkali ditemui di daerah perkotaan. Ketidakseimbangan yang muncul sebagai konsekuensi peningkatan jumlah penduduk adalah ketidakseimbangan antara jumlah pemakai jalan dan ruas jalan yang digunakan.

#### **1.4.2 Konsep Sektor Informal**

Istilah sektor informal pertama kali dilontarkan oleh *Keith Hart* (1971) dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada diluar pasar tenaga terorganisasi. Aktifitas-aktifitas informal tersebut merupakan cara melakukan sesuatu yang ditandai dengan, Mudah untuk dimasuki; Bersandar pada sumber daya lokal; Usaha milik sendiri; Operasinya dalam skala kecil; Padat karya dan teknologinya bersifat adaptif; Keterampilan dapat diperoleh diluar sistem sekolah formal; dan Tidak terkena secara langsung oleh Regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.

#### **1.4.3 Jenis-jenis Sektor Informal**

Menurut *Keith Hart*, ada dua macam sektor informal dilihat dari kesempatan memperoleh penghasilan, jika yang sah terdiri atas, kegiatan-kegiatan primer dan sekunder - pertanian, perkebunan yang berorientasi pasar, kontraktor



bangunan, dan lain-lain. Usaha tersier dengan modal yang relatif besar - perumahan, transportasi, usaha-usaha untuk kepentingan umum, dan lain-lain. Distribusi kecil-kecilan - pedagang kaki lima, pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang asongan, dan lain-lain.

Transaksi pribadi - pinjam-meminjam, pengemis. Jasa yang lain - pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, pembuang sampah, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak terdiri atas Jasa - kegiatan dan perdagangan gelap pada umumnya: penadiah barang-barang curian, lintah darat, perdagangan obat bius, penyelundupan, pelacuran, dan lain-lain. Transaksi - pencurian kecil (pencopetan), pencurian besar (perampokan bersenjata), pemalsuan uang, perjudian, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia selama ini menggunakan pengertian/definisi mengenai sektor informal berdasarkan kategori dari status pekerjaan dari pekerja. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Seperti diketahui, sejak tahun 2001 BPS membagi status pekerjaan menjadi 7 kategori, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (formal), buruh/karyawan/pegawai (formal), pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, pekerja tak dibayar.

#### 1.4.4 Konsep PKL

---

<sup>7</sup> Keith Hart, "Informal income Opportunities and Urban Employment in Ghana", dalam *Journal of Modern African Studies*, 11. (1) 1973, hal 61 – 89.





Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki yang dimaksud adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Menurut McGee dan Yeung PKL mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Menurut Waworoentoe (dalam Widjajanti, 2000: 28), PKL banyak dijumpai pada ruang-ruang fungsional kota, termasuk kawasan perkantoran.<sup>8</sup>

PKL dibagi menjadi dua :

1. PKL Tersentra Yaitu Pedagang kaki Lima yang dalam usahanya sehari-hari menempati lokasi yang telah sesuai atau diijinkan oleh pemerintah kota. Bila di kota Surabaya diijinkan oleh Pemkot Surabaya dan tempatnya sudah berbentuk *foodcourt*.
2. PKL Binaan Yaitu Pedagang Kaki Lima yang dalam usahanya sehari-hari menempati lokasi yang telah sesuai dan menggunakan tenda-tenda sebagai

---

<sup>8</sup> McGee, T.G. & Yeung, Y.M. 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities: planning for the Bazaar Economy*. Ottawa: International Development Research Centre. Hal 25



tempat dagangannya, namun keberadaannya selalu diawasi, dibina dan diarahkan untuk menjadi PKL yang baik.<sup>9</sup>

Secara sosiologis, PKL merupakan entitas sosial yang di dalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu seperti suku, etnik, bahasa, adat istiadat, asal daerah, jenis kegiatan, dan juga agama (Sarjono 2005:5). Entitas ini memiliki aktivitas yang sama yakni berdagang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dalam tata letak kota untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Barang dan jenis dagangan yang berbeda biasanya terkait dengan perbedaan latar belakang dan karakteristik pelaku PKL.<sup>10</sup>

Alisyahbana (2005:3-12) dalam sebuah penelitiannya menyebutkan bahwa pilihan menjadi PKL biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, keterpaksaan, karena tiada pekerjaan lain. Masyarakat migran dan juga sebagian penduduk asli memilih menjadi PKL karena tidak ada pekerjaan formal yang dapat dimasukinya. Atau minimal peluang untuk memperoleh pekerjaan formal terlalu kecil. Selain, karena alasan-alasan formal seperti ijazah, keterampilan, dan sebagainya, biasanya para migran tidak memiliki hubungan relasional dengan perusahaan atau instansi formal. Di sisi lain, mereka dituntut untuk dapat menghidupi setiap kebutuhannya sendiri. Mau tidak mau akhirnya mereka memilih pekerjaan sektor informal untuk bertahan di kota besar.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Tulus, Haryono, 1989. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus Di Kodya Surakarta, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada*.

<sup>10</sup> Sarjono Y (2005) *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Surakarta: Muhamamdiyah University Press.

<sup>11</sup> Alisyahbana (2005) *Sisi Gelap Perkembangan Kota*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.



Menurut Bromley, sebagaimana dikutip oleh Mulyanto (2007), "Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal". Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaiandengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan penyerapan teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan.

Hingga kini, jumlah PKL di Surabaya pada waktu riset ini dilakukan tahun 2007 dan 2008, sebanyak 14.000, sementara jumlah stan pasar yang kosong sebanyak 1.170 unit tersebar di enam puluh pasar milik pemkot. Meskipun pemkot telah menawarkan gratis retribusi selama setahun bagi para PKL yang mau menempati stan pasar, namun stan pasar yang dinyatakan kosong itu tetap kosong.<sup>12</sup>

Para PKL lebih memilih berjualan sendiri, dan biasanya di tempat-tempat yang dilarang, seperti di pinggir jalan raya, bahkan ada yang menggelar di badan jalan tertentu. Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa keberadaan PKL di tempat-tempat terlarang seperti di atas sangat mengganggu lingkungan sekitar. Badan jalan tidak bisa dilewati kendaraan dengan lancar, pemilik toko tidak bisa membongkar barang di depan tokonya, penghuni rumah tidak bisa leluasa keluar-masuk rumahnya, pemandangan tidak teratur, sampah menumpuk menimbulkan kesan kumuh dan bau tak sedap, dan masih banyak yang lain. Barangkali itulah

---

<sup>12</sup> Mulyanto.2007.Pedagang Kaki Lima. Dalam <http://www.Goegle.com/PKL>, diakses pada tanggal 11/05/2015, 15.43 WIB



beberapa citra buruk tentang keberadaan PKL di lokasilokasi konsentrasi PKL di Surabaya hingga saat ini.<sup>13</sup>

#### **1.4.5 Regulasi Sarana Bantu Jual dan Lokasi PKL**

Menurut Perda No 17 tahun 2003 pasal 1 ayat 11, sarana bantu jual PKL (gerobak atau rombongan) harus mudah dipindah dan dibongkar pasang, tetapi pengecualian pada sentra-senta PKL disana alat peraga tidak lagi harus mudah dipindah dan dibongkar pasang karena wilayah yang mereka tempati adalah legal bagi mereka untuk berjualan secara permanen.

#### **1.4.6. Penelitian Terdahulu**

Pertama penelitian yang dilakukan Agatha Ika Febrilianawati (2010) dengan judul penelitian Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta. Dalam penelitiannya, membahas tentang keefektifan kebijakan pengadaan relokasi PKL serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL di jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta dilihat dari sisi pelaksanaannya dikatakan efektif karena 14 tujuan kebijakan tercapai yaitu menciptakan kawasan bebas PKL di dekat Kampus Kentingan UNS dan kawasan yang asri berkaitan dengan dibangunnya Solo Techno Park. Namun apabila dilihat dari sisi lain, yakni dari efisiensi dan kelompok sasaran, maka kebijakan disimpulkan belum efektif karena tidak mencapai efisiensi dan masyarakat PKL merasa tidak puas dengan hasil kebijakan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Asiyah, Udji. 2012. Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur. Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Volume 25, Nomor 1: 47-55

<sup>14</sup> Febrilianawati, Agatha Ika. 2010. *Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta*, UNS: Surakarta



Berikutnya thesis yang di tulis oleh Novi Hasanah 23895/IV-4/1750-06, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Maret 2008 yang berjudul "Dampak Kehadiran Plaza Ambarukmo Terhadap Aktivitas Jual Beli Di Pasar Tradisional Gowok Yogyakarta". Dalam penelitian ini menjelaskan upaya para pedagang Pasar Gowok terhadap tantangan dari pihak Plaza Ambarukmo yaitu mensiasati perubahan pasar dan perilaku pembeli serta menerapkan langkah untuk mempertahankan eksistensi Pasar Gowok. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa para pedagang melakukan strategi bertahan hidup sebagai respon terhadap keberadaan Plaza Ambarukmo. Ada lima strategi bertahan hidup yang dipakai pedagang Pasar Gowok dalam mensiasati perubahan pasar dan perilaku pembeli yaitu menambah jumlah modal, memperpanjang waktu berjualan, meningkatkan pelayanan, menambah ragam dan jumlah komoditas, serta meningkatkan daya tarik komoditas.<sup>15</sup>

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Setyo Budi (2009) yang berjudul "Analisis Kritis Peraturan Daerah Kota Surakarta No.3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL Perspektif Kesejahteraan Sosial", membahas mengenai kesejahteraan pedagang kaki lima ditinjau dari pandangan PKL itu sendiri dan dilihat dari segi peraturan yang dibentuk yakni Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, mengenai kesesuaiannya dengan UUD 1945 serta visi dan misi Kota Surakarta dalam mensejahterakan masyarakatnya. Dengan menganalisa sistem

---

<sup>15</sup> Novi Hasanah, *Dampak Kehadiran Plaza Ambarukmo Terhadap Aktivitas Jual Beli Di Pasar Tradisional Gowok Yogyakarta*, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2008.





penormaan yang tertuang dalam Perda yang memiliki kesesuaian dengan konsep welfare state dan UUD 1945, sehingga disimpulkan bahwa Perda Kota Surakarta No.3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL telah mengakomodir konsep kesejahteraan sosial dalam perspektif masyarakat.<sup>16</sup>

Selain itu thesis agussiyah Putra, Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara Medan yang berjudul "*Pengaruh Pengembangan Pasar Modern terhadap Kehidupan Pasar Tradisional Di Pasar Medan ( Study Kasus Di Pusat Pasar Medan)*". Dalam penelitian ini bahwasanya ternyata keberadaan pasar modern (Medan Mall) mempengaruhi variasi pendapatan pedagang tradisional di pusat pasar modern tersebut. Selain itu terdapat perbedaan antara pasar modern (Medan Mall) dengan pasar tradisional di pusat Pasar Medan, yakni menyangkut perbedaan dalam hal belanja, kenyamanan berbelanja serta kualitas barang yang diperjualbelikan.<sup>17</sup>

Dari beberapa pembahasan di atas mengenai penelitian sebelumnya yang penulis temukan jelas sekali perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, walaupun sama – sama berbicara mengenai PKL, namun secara lokasi dan objek bahasan sangat jauh berbeda, Meskipun terdapat beberapa kesamaan, diantaranya kota tempat melaksanakan penelitian, objek yang dijadikan penelitian serta peraturan yang digunakan sebagai salah satu sumber dalam penelitian. Letak perbedaannya adalah permasalahan yang dibahas dalam penelitian. penulis dalam penelitian ini akan mengkaji "Sentralisasi Sektor

---

<sup>16</sup> Budi, A.S. 2009, Analisis Kritis Perda No. 3 Tahun 2008 Perspektif Kesejahteraan PKL. Dalam <http://www.Google.com/penelitian/pkl/12/11/2011>. diakses pada tanggal 11 Juni 2015, 15.38 WIB.

<sup>17</sup> Agussiyah Putra, *Pengaruh Pengembangan Pasar Modern terhadap Kehidupan Pasar Tradisional Di Pasar Medan ( Study Kasus Di Pusat Pasar Medan)* Universitas Sumatra Utara Medan, 2004.



Informal Perkotaan (Studi Deskriptif Perubahan Sosial - Ekonomi PKL di DTC Wonokromo)" serta mengetahui kondisi pelaksanaan program sentralisasi PKL, perubahan kondisi ekonomi PKL, hubungan sosial dan strategi adaptasi.





## 1.5 TEORI

### Teori Pertukaran Sosial Peter M. Blau

Peter M. Blau berusaha mengembangkan sebuah teori pertukaran yang menggabungkan tingkah laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni antara kelompok, organisasi, dan Negara.

Konsep Blau tentang pertukaran sosial terbatas pada tingkah laku yang mendatangkan imbalan, yakni tingkah laku yang akan berhenti kalau dia berasumsi bahwa tidak bakal ada nada imbalan lagi. Menurutnya, orang-orang tertarik kepada satu sama lain karena bermacam-macam alasan yang memungkinkan mereka membentuk atau membangun asosiasi-asosiasi sosial atau organisasi-organisasi sosial. Apabila satu kelompok di dalam asosiasi itu membutuhkan sesuatu dari kelompok lain tetapi tidak mungkin mengembalikannya dalam imbalan yang seimbang, maka 4 kemungkinan dapat terjadi yaitu sebagai berikut.

- a) Orang dapat memaksa orang lain untuk menolongnya.
- b) Mereka mencari dari sumber yang lain, bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- c) Mereka dapat bertahan dan hidup terus tanpa memperoleh apa yang mereka butuhkan itu.
- d) Yang terpenting mereka dapat takluk kepada orang-orang lain yang memberikan bantuan kepada mereka.



Tujuan Blau adalah untuk memahami struktur-struktur sosial yang berdasarkan analisis proses sosial yang mempengaruhi hubungan antar individu dan kelompok. Ia bermaksud menganalisis struktur sosial yang lebih kompleks. Ia memusatkan perhatian pada proses pertukaran yang menurutnya mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi hubungan antar individu maupun kelompok.<sup>18</sup>

Pertukaran sosial berangkat dari asumsi "do ut des" saya memberi supaya engkau memberi. Semua hubungan di antara manusia bertolak dari skema memberi dan mendapatkan kembali dalam jumlah yang sama. Dengan anggapan seperti ini terjadi pertukaran atau tingkah laku yang dipertukarkan dalam kehidupan sosial.

Konsepsi di atas setidaknya memberikan makna bahwa pada hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi manusia dalam memandang tentang hubungan itu, dengan orang lain sesuai anggapan diri manusia tersebut terhadap keseimbangan antara apa yang diberikan kedalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu, jenis hubungan yang dilakukan dan kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Teori Sosiologi Modern, Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2007, Ritzer, George and Goodman Douglas J, Teori Sosiologi Modern, Edisi Terbaru, Jakarta: Prenada Media, 2004*

<sup>19</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm., 79



Proses ini dapat terlihat adanya motivasi dan kontak masyarakat saling tarik-menarik dalam memenuhi kebutuhan yang dapat bermanfaat untuk dipertukarkan pada setiap hubungan sosial. Tingkah laku manusia didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi serta memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang.

Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan, sebab individu akan melanjutkan interaksi bila laba lebih banyak dari biaya. Sehingga, dalam berinteraksi antara individu dengan individu yang tercapai adalah suatu keuntungan yang dapat memberikan kepuasan dan kenikmatan.

Peter M. Blau dalam (Bernard Radho:176) berpendapat bahwa pertukaran sosial terbatas kepada tingkah laku yang mendatangkan imbalan, yakni tingkah laku yang akan berhenti kalau tidak bakal ada imbalan lagi. Menurut Blau, orang tertarik kepada satu sama lain karena bermacam-macam alasan yang memungkinkan mereka membentuk atau membangun asosiasi dan organisasi sosial.

Begitu ikatan awal sudah terbentuk maka imbalan yang mereka berikan kepada satu sama lain berfungsi untuk mempertahankan dan menguatkan ikatan itu. Sebaliknya, imbalan yang tidak seimbang akan memperlemah bahkan menghancurkan asosiasi itu.

Imbalan menurut Peter M. Blau yang dipertukarkan digolongkan ke dalam dua jenis sifat yakni: *Pertama*, yang bersifat intrinsik seperti; cinta, afeksi (rasa





kasih sayang), dan penghargaan. *Kedua*, yang bersifat ekstrinsik berupa; uang atau barang material lainnya. Sehingga Blau menguraikan bahwa apabila satu orang membutuhkan sesuatu dari orang lain, tetapi memberikan apapun yang sebanding sebagai tukarannya, maka akan terjadinya faktor-faktor yakni; orang itu dapat memaksa orang lain membantunya, orang itu akan mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan orang itu tetap bergaul dengan baik tanpa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dari orang lain serta orang itu akan menundukkan diri terhadap orang lain dan dengan demikian memberikan orang lain itu penghargaan-penghargaan yang sama dalam hubungan antar mereka (Bernard Radho, 2007 :177).<sup>20</sup>

Melihat konsepsi di atas, dapat ditarik suatu pemahaman; *Pertama*, individu yang membutuhkan orang lain berupaya untuk mendapatkan dukungan dan bantuan demi terciptanya hubungan yang menguntungkan. *Kedua*, orang yang berada dalam relasi tersebut bertindak mencari kebutuhan dan jika tidak ada ganjaran yang diperolahnya maka hubungan yang terbangun akan berantakan. *Ketiga*, adanya pembedaan hubungan di antara individu sehingga terjadi pertentangan maka hal itu mendasari terjadinya perubahan atau peralihan dalam hubungan tersebut. *Keempat*, konsep hubungan yang terjalin dalam masyarakat hanya mengarah pada norma dan nilai untuk mendapatkan penghargaan yang diharapkan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, hlm., 97.

<sup>21</sup> [http://beasiswa.unair.ac.id/sites/default/files/perpanjangan/2013/ki\\_M%20Khusna%20Amal\\_5064.pdf](http://beasiswa.unair.ac.id/sites/default/files/perpanjangan/2013/ki_M%20Khusna%20Amal_5064.pdf). State of The Art Teori Pertukaran Sosial, hal, 10 - 11



Nilai dipandang sebagai media atau alat di dalam transaksi sosial, dalam pandangan Peter M. Blau (Bernard Radho:181) terdapat empat tipe dasar nilai :

1. Nilai partikular adalah media untuk integrasi dan solidaritas di dalam masyarakat yang berfungsi untuk memperkuat kelompok ke dalam (eksternal)
2. Nilai universal adalah nilai berdasarkan standar umum dengan standar itu sebuah pertukaran tidak langsung bisa dilakukan. Misalkan seseorang memberi kontribusi pada segmen kehidupan masyarakat maka nilai universal itu memungkinkan untuk mendapatkan imbalan atau status tertentu kepada individu tersebut atas sumbangannya.
3. Nilai bersifat legitimasi otoritas ini memberi legitimasi atas kekuasaan kepada orang seperti para pimpinan supaya memberikan kontrol sosial.
4. Nilai oposisi merupakan nilai yang kemungkinan menyebarkan perasaan akan perlunya perubahan yang jauh lebih efektif.<sup>22</sup>

Berdasarkan pandangan di atas bahwa pertukaran tidak hanya terjadi dari hubungan tiggah laku antara individu dengan individu tetapi pertukaran yang bersifat makro (skala besar) lebih kepada kenyataan sosial yang lebih luas seperti kelompok, organisasi, kolektivitas masyarakat serta norma dan nilai-nilai.

---

<sup>22</sup> George Ritzer – Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm., 372.



## 1.6 METODE PENELITIAN

### 1.6.1 Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam kelancaran atau keberhasilan dalam penelitian, dengan menggunakan metode penelitian yang tepat maka permasalahan penelitian dapat terjawab dan tujuan penelitian dapat tercapai. Metode penelitian tersebut meliputi: tipe penelitian, definisi operasional, teknik pengambilan populasi dan sampel, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>23</sup>

Penelitian yang dilakukan di DTC Wonokromo ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif ini peneliti menggunakan kuesioner sebagai panduan untuk melakukan wawancara terhadap responden agar mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan topik penelitian. Peneliti juga memberikan kode-kode yang ada pada setiap jawaban di kuesioner untuk mempermudah pendistribusian data ke dalam tabel frekuensi. Lalu kemudian data yang sudah didistribusikan ke dalam tabel frekuensi kemudian dianalisis.

---

<sup>23</sup> Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian.1995. *Metode penelitian survey*. Jakarta: LP3ES.



### 1.6.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang kami gunakan adalah tipe penelitian deskriptif, Penelitian yang akan dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif, dalam tipe penelitian yang demikian bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena atau permasalahan yang akan diteliti. Karakteristik tersebut dapat berupa keadaan atau gejala baik pada tatanan individu maupun pada tatanan komunitas atau kelompok. Dengan maksud untuk memberikan suatu gambaran tentang realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan cara memberikan kode-kode ( coding ) di dalam kuesioner, kemudian pemberian skor pada setiap variable untuk di distribusikan ke dalam table frekuensi yang di gunakan untuk menganalisis data, kemudian membuat table silang untuk membandingkan anatar variabel.

### 1.6.3 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional merupakan suatu informasi ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Dari informasi tersebut, akan diketahui bagaimana caranya pengukuran atas variabel itu dilakukan. (Masri Singarimbun, 1995: 46).

Memahami pelaksanaan program sentralisasi PKL terhadap perubahan kondisi PKL di DTC Wonokromo yang dapat dilihat menggunakan konsep :



A. Pelaksanaan program sentralisasi PKL

Pelaksanaan program sentralisasi PKL yang dilakukan pemerintah dapat dilihat dari seberapa sering sosialisasi, monitoring, berapa kali terjun lapangan, pendataan.

B. Perubahan kondisi ekonomi PKL

Perubahan kondisi PKL dalam program sentralisasi PKL dapat dilihat dari, pengelolaan sentralisasi, sistem penjualan, pembagian upah sebelum adanya dan sesudah adanya program.

C. Hubungan sosial

Hubungan PKL secara sosial meliputi hubungan dengan PKL yang lain, hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan pengurus pasar, hubungan dengan distributor.

D. Strategi adaptasi

Strategi pedagang kakil lima dan sesudah adanya sentralisasi meliputi pergantian kepengurusan pasar, pergantian aturan dan pergantian lokasi berjualan.





## 1.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di DTC wonokromo dimana kawasan tersebut terdapat banyak para pedagang kaki lima terutama dalam hal sentralisasi dengan banyaknya jumlah PKL yang berdagang disitu, sebanyak 256 mantan PKL yang disentralkan atau dipusatkan menjadi pedagang pada lantai 1 blok C, selain itu DTC Wonokromo juga sangat terorganisir serta beroperasi tiap hari.

## 1.8 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang berada di sentralisasi PKL DTC Wonokromo. Untuk sampel dalam penelitian ini adalah ( data PKL DTC Wonokromo ) . Penulis menggunakan metode penentuan sampel menggunakan cluster, atau unit – unit analisa dalam populasi digolongkan ke dalam gugus – gugus, dan ini akan merupakan satuan – satuan dari mana sampel akan diambil, jumlah gugus yang diambil sebagai sampel harus secara acak. Kemudian untuk unsur – unsur penelitian dalam gugus tersebut diteliti semua.<sup>24</sup>

Dalam proses penelitian ini teknik yang digunakan dalam menentukan responden penelitian yaitu secara purposive, yaitu subyek merupakan pelaku utama dalam studi ini sehingga mampu memberikan informasi mengenai data yang diperlukan selama berlangsungnya proses penelitian., yakni pertimbangan bahwa orang-orang yang menjadi responden dianggap benar-benar tahu serta mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>24</sup> Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian.1995. *Metode penelitian survey*. Jakarta: LP3ES.



Menurut Spradley, penentuan subyek didasarkan atas pertimbangan; Pertama, mereka menguasai dan memahami sesuatu melalui proses inkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati. Kedua, mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. Ketiga, mereka yang mempunyai kesempatan atau waktu yang memadai untuk diminta informasi. Keempat, mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Kelima, mereka pada mulanya tergolong cukup asing akan hadirnya orang lain sehingga lebih mengarahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber (Lexi Melong, 2008). Dalam penelitian ini, diharapkan berhasil mendapatkan subyek yang dibutuhkan, sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan.

Dari populasi pedagang yang berjumlah 256 orang. Untuk pengambilan sampel digunakan dengan metode cluster random sampling. Dengan spesifikasi : Responden dapat diketahui dari perbedaan barang – barang yang dijual dimana responden adalah pedagang pasar DTC Wonokromo bagian blok C saja merujuk pada informasi dari Ketua PD. SURYA cabang Wonokromo Bapak Hendra selaku pengelola pasar DTC Wonokromo. Jumlah populasi adalah 249 dengan 12 macam barang yang diperdagangkan. Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah :



**Tabel 1.8.1 Penentuan Sampel**

Jenis barang dagan	Jumlah pedagang	Sampel yang diambil
1. Konveksi	72	12
2. Ayam potong	54	8
3. Warung	53	8
4. Rombeng	30	7
5. Daging	18	5
6. Ikan pindang	7	2
7. Sepatu	6	2
8. Arloji	4	2
9. Unggas	4	1
10. Merancang	1	1
11. Mainan	1	1
12. Tempe	1	1
Total	251	50

*Sumber : data monografi PD Surya*

## **1.9 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini dibutuhkan data-data ataupun informasi yang akurat dengan sumber data yang dapat dipertanggung jawabkan serta terpercaya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang dapat menjawab permasalahan penelitian secara obyektif serta



berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut maka dipergunakan beberapa teknik pengumpulan data yang antara satu dengan lainnya bersifat saling melengkapi. Data yang diperoleh dapat dikategorikan kedalam dua jenis data, antara lain yaitu data primer dan data sekunder. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kami menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

Sumber data :

➤ Data Sekunder

Dalam hal ini data kami peroleh dari pihak-pihak yang mampu membantu memberikan informasi mengenai adanya program sentralisasi pedagang kaki lima di DTC Wonokromo. Selain itu kami juga menggunakan penelitian terdahulu yang relatif sama dengan penelitian ini sebagai salah satu acuan data.

Studi pustaka atau literatur, menggunakan buku-buku dalam kaitannya dengan kajian teoritik sehingga dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

➤ Data Primer

Data primer kami dapatkan dari wawancara dengan menggunakan seperangkat kuesioner yang telah dibuat sebelumnya untuk mendapatkan data berupa gambaran secara umum tentang adanya program sentralisasi PKL di DTC Wonokromo sendiri maka didapatkan data-data primer dalam bentuk angka / kuantitatif yang berasal dari wawancara terhadap responden dengan bantuan kuisisioner tersebut.



Beberapa metode yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data pada kegiatan penelitian ini meliputi wawancara yang akan dijelaskan sebagai berikut :

➤ Wawancara

Yaitu melakukan wawancara dengan cara menggunakan kuesioner, dimana kuesioner tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sebagian besar merupakan pertanyaan tertutup, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebelumnya telah disusun sehingga pengajuan pertanyaan bisa dilaksanakan secara terstruktur yang diajukan untuk responden dan yang akan diwawancarai sebelumnya telah di tentukan sehingga memudahkan peneliti dalam melaksanakan wawancara.

#### **1.10 Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan proses editing dimana angka-angka dari data yang telah didapat dari kuesioner dimasukkan ke dalam koding-koding yang telah disediakan pada saat pembuatan kuesioner. Kemudian dilakukan input data dengan menggunakan program Ms.Excel lalu digunakan program SPSS sebagai analisis kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel frekuensi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya analisis dilakukan dengan menganalisis variabel yang dalam hal ini dinyatakan dalam sebaran frekuensi angka-angka maupun dalam bentuk presentase dan dijelaskan dengan penjelasan kuantitatif. Lalu menggunakan tabel frekuensi untuk mendeskripsikan hasil lapangan. Tabel frekuensi dibagi berdasarkan pertanyaan di kuesioner.





Cara kedua, adalah peneliti mencoba mencari pengertian yang lebih luas tentang hasil-hasil yang didapatkannya dari analisis. Ini dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan hasil analisisnya dengan kesimpulan peneliti lain dan dengan menghubungkan kembali interpretasinya dengan teori. Tahap ini sangat penting, tetapi sering tidak dilaksanakan oleh banyak peneliti sosial. (singarimbun dan effendi, 1989: 263-264).<sup>25</sup>

Pengolahan data terdiri dari beberapa tahap, antara lain yaitu:

1. Pemeriksaan data (editing) yang berkaitan dengan kelengkapan pengisian, kejelasan tulisan, kejelasan makna, konsistensi/keajegan dari kesesuaian antar jawaban, relevansi jawaban serta keseragaman kesatuan data pada kuesioner.
2. Pembuatan kode (coding) pada kuesioner dimana hal ini berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat analisis. Setelah pembuatan kode (coding), kemudian dilakukan penyederhanaan data dengan cara membuat klasifikasi yaitu menggolongkan data dari ratusan/puluhan jawaban.
3. Setelah kuesioner dikoding, kemudian kuesioner diinput ke dalam SPSS dan kemudian ditransformasikan ke dalam tabel frekuensi.
4. Tabel frekuensi kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebaran distribusi dan untuk melihat frekuensi jawaban responden.

---

<sup>25</sup> Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian.1995. *Metode penelitian survey*. Jakarta: LP3ES.